



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 10 Maret 2020/Periodik - 2019)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN PEKERJAAN UMUM DAN PERUMAHAN RAKYAT
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL BINA MARGA
SUB UNIT KERJA : DIREKTORAT PEMBANGUNAN JALAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : ACHMAD HERRY MARZUKI
2. Jabatan : DIREKTUR PEMBANGUNAN JALAN
3. NHK : 453922

II. DATA HARTA**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. 2.422.668.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 551 m2/275 m2 di KOTA SURABAYA
, HASIL SENDIRI Rp. 1.445.926.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 200 m2/180 m2 di KOTA SURABAYA
, HASIL SENDIRI Rp. 976.742.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN Rp. 652.000.000

1. MOBIL, SUZUKI SWIFT AZF414F(4X2)AT Tahun 2012, HASIL
SENDIRI Rp. 140.000.000
2. MOBIL, TOYOTA YARIS Tahun 2014, HASIL SENDIRI Rp.
152.000.000
3. MOBIL, TOYOTA INOVA Tahun 2017, HASIL SENDIRI Rp.
360.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA Rp. ---**D. SURAT BERTAHAGA** Rp. ---**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. 456.237.017**F. HARTA LAINNYA** Rp. 958.850.000**Sub Total** Rp. 4.489.755.017**III. HUTANG** Rp. ---**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. 4.489.755.017

Catatan:



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini diumumkan dengan catatan **LENGKAP** berdasarkan hasil verifikasi tanggal **9 April 2020**.
4. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.